BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Semakin hari kemajuan teknologi semakin bertambah secara pesat, hal ini tentu saja merubah tatanan kehidupan manusia. Perkembangan teknologi memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat tetapi disamping itu bertambah juga tindakan yang merugikan didalamnya, salah satunya yakni *cyber crime*. Dalam Laporan Kongress Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) ke X pada tahun 2000, menyatakan bahwa *cyber crime* merupakan keseluruhan bentuk baru kejahatan yang ditujukan pada computer, jaringan computer dan para penggunanya dan bentuk kejahatan yang saat ini dilakukan menggunakan computer (Priyanto, 2022, hal. 14). *Cyber crime* dibagi menjadi dua kategori yakni dalam arti sempit dan dalam artian yang luas, *cyber crime* dalam artian sempit berarti kejahatan yang ada dalam sistem komputer dimana kejahatan tersebut bertujuan untuk merusak sistem komputer sedangkan dalam arti luas berarti kejahatan dalam sistem jaringan komputer yang menggunakan sarana komputer sebagai alat bantu menjalankan kejahatannya (Aldriano & Mas Agus Priyambodo, 2022, hal. 2169). Kejahatan siber sangat beragam, salah satunya yang sering terjadi yakni *phishing* melalui berbagai macam cara, seperti mengirimkan pesan berisikan tautan ataupun panggilan telepon namun modusnya selalu sama yakni pelaku menjebak korban dengan cara memancing korban tersebut dengan tawaran yang menggiurkan korban namun biasanya terdapat syarat yakni dengan melakukan apa yang diminta oleh pelaku

phising biasanya korban diminta untuk menyebutkan data pribadinya dengan modus menjadi suatu instansi terpercaya (Wibowo & Nur Fatimah, 2017, hal. 1–2). Pelaku *phising* atau disebut sebagai *phisher* biasanya memanipulasi korban sebagai pegawai yang berasal dari instansi atau perusahaan terpercaya dan memberikan informasi seolah informasi tersebut benar adanya, biasanya berupa penawaran yang menarik, pemblokiran akun, verifikasi data ataupun claim sebuah hadiah. Setelah korban tertarik, *phisher* akan meminta data pribadi milik korban yang nantinya akan digunakan untuk masuk tanpa izin dan hak ke akun pribadi milik korban dan menjalankan aksinya yang menyebabkan korban mendapatkan kerugian.

Dalam penulisan Memorandum Hukum ini, penulis menggunakan metode deskriptif normatif. Metode penulisan merupakan cara penulis untuk menentukan langkah penulis melakukan pengumpulan dan pengolahan data, sehingga penelitian hukum dapat dilakukan secara sistematis dan menjadi unsur yang harus ada dalam melakukan penelitian hukum. Metode penulisan yang penulis gunakan metode deskriptif normatif sering digunakan dalam melakukan penelitian hukum. Metode ini menggunakan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, atau menggunakan dokumen yang relevan, kemudian data tersebut dijadikan satu dan dianalisis secara kualitatif agar dapat memberikan gambaran yang berkaitan dengan aturan yang ada dan hukum diletakkan sebagai sebuah susunan sistem norma yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi, sehingga aturan tersebut dapat diterapkan dalam penulisan penelitian yang dibuat (Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, hal. 43). Dengan itu metode ini dapat memberikan gambaran yang luas dan mendalam tentang aturan dan penerapannya di masyarakat sebagai cara memahami

dan mengembangkan aturan yang ada, hal membuatnya sangat penting dalam melakukan penelitian hukum.

Salah satu penipuan *phishing* menggunakan telepon atau dapat disebut sebagai *Vishing (voice phishing)* pernah terjadi kepada kerabat saya bernama Tuan S, pada 6 Januari 2024 ia dihubungi melalui panggilan selular oleh seseorang yang mengaku sebagai *customer service* kartu kredit dari Perusahaan AEON, penelpon tersebut menawarkan kenaikan limit kartu kredit milik Tuan S, pada saat itu Tuan S diminta untuk menyebutkan data pribadi milik Tuan S dan nomor kartu kredit milik Tuan S. Setelah menuruti apa yang diminta oleh penelpon, Tuan S menerima sebuah pesan berisi kode OTP dan penelpon tersebut kembali meminta Tuan S menyebutkan kode OTP itu, kemudian panggilan seluler tersebut berhenti.

Beberapa saat kemudian kembali muncul pemberitahuan diponsel Tuan S mengenai konfirmasi berhasil melakukan transaksi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), merasa tidak melakukan transaksi apapun Tuan S segera menelpon layanan pengaduan Kartu Kredit perusahaan AEON dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, mengetahui hal itu petugas tersebut mengkonfirmasi bahwa benar telah ada transaksi yang berhasil di kartu kredit atas nama Tuan S, dan memberitahu Tuan S bahwa bukan seperti itu cara menaikkan limit.

Jika melihat dari kasus diatas maka sudah jelas bahwa Tuan S terkena penipuan *phishing* namun dikarenakan dalam keadaan yang kurang berhati-hati dan kurangnya informasi mengenai penipuan *online* Tuan S tidak mengetahui hal tersebut dapat terjadi dan bagaimana cara menghindarinya. Kasus tersebut juga dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, namun karena Tuan S panik dan tidak

mengetahui bahwa kejadian tersebut masuk kedalam tindak pidana, maka Tuan S tidak menindak hal ini lebih lanjut. Maka dari itu penulis berniat untuk mengakat kasus *phishing* terhadap konsumen pemegang kartu kredit Perusahaan AEON, dimana penulis akan memberikan penjelasan dan pendapat hukum terkait permasalahan yang menimpa Tuan S.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk menjalankan penelitian dengan bentuk Memorandum Hukum dengan judul **“Pendapat Hukum Tentang *Phishing* Terhadap Pemegang Kartu Kredit Perusahaan AEON Dalam Perspektif Hukum Pidana”**.